

**RELASI KUASA DAN BISNIS
(STUDI ATMOSFER POLITIK DI KABUPATEN MAROS SULAWESI SELATAN
INDONESIA)**

Marcus F. Pessireron¹, Justintje A. Moriolkosu²

^{1,2}Jurusan Teknik Elektro, Politeknik Negeri Ambon

pessireron_marc@yahoo.co.id, Justine.moriolkosu@gmail.com

Abstract

This study aims to obtain in depth information about the pattern of relations between ruling groups and entrepreneurs in the Maros political atmosphere in Indonesia. This type of research is qualitative by using a constructivism approach. In collecting data researchers gather discourse data through print and electronic media and researchers act always as research instruments. Collected data is the relationship between the authorities and entrepreneurs in the Maros political atmosphere in Indonesia. In data collection, researchers collected, discourse data through print and electronic media and researchers acted as instruments of research. Data collected was the relationship between rulers and entrepreneurs in the political atmosphere of Maros in Indonesia. This data was obtained through two sources namely documentation and informants. Collection techniques the data was carried out through the in depth interview method. Furthermore, the data was analyzed using interactive analysis techniques intended to see the process of meaning and effects of discourse production and reproduction. The results showed that power relations between ruling groups and entrepreneurial groups had two objective and subjective dimensions reciprocally influential in producing up to reproducing the discourse of power it produces support for upper level middle level ruling groups to the lowest level of authority in the region.

Keywords : Discourse, Power, Politics, Business

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan informasi mendalam tentang pola relasi antara kelompok penguasa dan pengusaha (bisnis) pada atmosfer politik Maros Indonesia. Jenis penelitian adalah kualitatif dengan menggunakan pendekatan konstruktivisme. Dalam pengumpulan data, peneliti mengumpulkan data wacana melalui media cetak dan elektronik, serta peneliti bertindak selaku instrumen penelitian. Data dikumpulkan ialah relasi antara penguasa dan pengusaha pada atmosfer politik Maros di Indonesia. Data ini diperoleh melalui dua sumber yakni; dokumentasi dan informan. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui metode wawancara mendalam. Selanjutnya data tersebut dianalisis dengan menggunakan teknik analisis interaktif dimaksudkan untuk melihat proses, makna, dan efek dari produksi dan reproduksi wacana. Hasil penelitian menunjukkan bahwa, relasi kuasa antara kelompok penguasa dan kelompok pengusaha memiliki dua dimensi objektif dan subjektif, berpengaruh secara resiprokal dalam memproduksi hingga mereproduksi wacana kekuasaan menghasilkan dukungan terhadap kelompok penguasa level atas, level menengah, hingga ke level penguasa terendah di daerah.

Kata Kunci: Wacana-Kuasa-Politik-Bisnis

1. PENDAHULUAN

Relasi politik pada kelompok penguasa memungkinkan bagi kelompok pengusaha untuk membangun pola-pola kerjasama melalui pendekatan sosial dan kekeluargaan. Sementara hubungannya dengan kekuasaan dan ekonomi politik dalam kerangka atmosfer politik ialah perusahaan hanya memanfaatkan sumber daya alam dan mengesampingkan dampak negatif terhadap lingkungan sehingga memicu proses terjadinya degradasi lingkungan hidup. Sementara itu, dampak negatif lainnya ialah terhadap pemanfaatan sumber daya manusia dan pembangunan menimbulkan masalah dualisme yang terdiri dari kekuatan pola struktur sosial (relasi aktor) dan struktur material (*kondisi sosial ekonomi dan morfologi wilayah*). Sehubungan dengan itu, dalam kajian nasional tentang relasi kuasa dan bisnis juga telah banyak dipublikasikan pada beberapa hasil penelitian dan mimbar akademik. Dari hasil laporan penelitian terdahulu akan dijadikan rujukan sebagai modal pendekatan (*epistemologi*) dalam penelitian ini.

Sebagaimana yang dikemukakan oleh Bulkhin, 1983; Mas'oed, 1989; Brown, 2006; Amri, 2010; Achwan, 2011; Djani, 2011; Innah, Darmawan, Suharjito, dan Darussalam, 2012; dan Suyatna, 2012, dari hasil penelitian yang penulis rangkum dan memiliki kesamaan ialah bahwa relasi kuasa dan bisnis menimbulkan rasa prihatin terhadap kooptasi kekuatan politik, ekonomi politik dalam atmosfer politik, serta pemeliharaan lembaga-lembaga politik dan birokrasi yang berlaku di Indonesia. Disamping itu juga memunculkan kapitalisme

semu, alhasil munculnya pengusaha/konglomerat hitam yang di dalam proses pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya alam hanya menguntungkan kepada kelompok mereka sendiri. Kelompok yang dimaksud ialah kelompok penguasa dan kelompok pengusaha yang membangun dan menjalin relasi dalam melanggengkan usaha mereka. Selanjutnya, memunculkan iklim politik dan ekonomi yang terjadi diantara para kaum borjuasi dengan pemegang kekuasaan terjebak dalam dimensi kapitalisme semu yang didominasi oleh para pengusaha yang memiliki modal besar.

Sehubungan dengan itu, pengusaha yang tidak memiliki akses langsung kepada kelompok penguasa sehingga secara optimal mereka tidak dapat mengelola sumber daya alam oleh karenanya sumber daya alam tersebut sudah menjadi bagian dari skenario dari kelompok penguasa untuk memberikannya kepada kelompok pengusaha yang secara khusus memiliki kedekatan (*patron klien*). Pola hubungan diantara kelompok penguasa dan kelompok pengusaha tidaklah sesederhana seperti yang dinarasikan dalam konsep *state capture* yang diwarnai dengan pola hubungan diantara kelompok elite yang berkuasa dengan kelompok bisnis. Hal ini ditunjukkan jikalau kelompok pengusaha ingin merengkuh langsung kepada sumber daya publik, beberapa diantara mereka menduduki jabatan publik, termasuk kursi parlemen. Sedangkan, relasi yang terbangun dengan *profil ekonomi* didominasi oleh sektor publik (*state driven-economy*) yang membuat pengusaha menjadi sangat tergantung pada kelompok-kelompok elite berkuasa yang dengan demikian

bertolak belakang dengan konsep *state capture*.

Secara substantif, penelitian terdahulu perihal kajian tema relasi kuasa, dan bisnis baik yang dilakukan dalam konteks internasional maupun nasional terpola pada dua kajian utama. *Pertama*, sebagian peneliti mengemukakan manfaat dan kontribusi yang dihasilkan melalui relasi perusahaan dan negara yang membawa keuntungan di kedua belah pihak dan tidak memberikan dampak positif bagi masyarakat. *Kedua*, terdapat pola-pola relasi yang dilakukan oleh kedua belah pihak dengan mengindahkan aturan-aturan yang memberikan dampak kerusakan terhadap lingkungan atau bahkan aturan-aturan tersebut dibuat untuk mempermudah jalannya proses kerja sama dengan perusahaan dengan jalan memberikan suap atau melakukan praktik kolusi. Berbagai publikasi karya ilmiah tersebut secara jelas menunjukkan bahwa penelitian atmosfer politik masih berada di seputar tradisi klasik, dimana realitas ontologisnya terbatas pada masalah struktural (*relasi sosial*) dan masalah material (*relasi ontologi*). Fenomena pengembangan perusahaan tidak terlepas dari bentuk kerja sama antara kelompok penguasa dan pengusaha serta partai politik yang berkuasa. Terjadinya sebuah relasi diantara penguasa dengan pengusaha dalam mengembangkan bisnisnya serta menimbulkan dampak terhadap atmosfer politiknya.

Sehubungan dengan itu, atmosfer politik dimaksudkan dalam penulis ini adalah sebuah daya (kekuatan-power) politik oleh para elit politik, sejauh ini belum maksimal memenuhi janjinya karena gagal memberikan “peta jalan”

ideologis maupun operasional kearah pembangunan *ekonomi* berkelanjutan yang adil dan merata. Kegagalan ini berasal dari kelemahannya dalam bidang ekonomi politik (*political economy*) yang pada awalnya menjadi tonggak dasar kekuatan politik melainkan selanjutnya dikalahkan kepentingannya oleh atmosfer politik. Kebaruan ontologi sebagai *state of the art* penelitian ini kemudian diperkuat oleh fakta sosiologis yang menunjukkan bahwa relasi kuasa dan bisnis studi atmosfer politik yang termuat dalam setiap aktivitas perkembangan perusahaan yang berada di wilayah Kabupaten Maros senantiasa di hiasi dengan “benturan wacana” sebagai bentuk representasi kepentingan multiaktor. Di satu pihak reproduksi wacana yang menyatakan (*thesa*) perkembangan perusahaan menjadi aktivitas produksi salah satu penggerak utama pembangunan wilayah melalui pendapatan asli daerahnya, penyerapan tenaga kerja, dan diikuti pertumbuhan sektor *ekonomi* informal juga pengurangan kemiskinan.

Sementara di lain pihak reproduksi wacana perlawanan (*antithesa*) yang memandang praktik perkembangan perusahaan terdapat hubungan *patron-klien* antara kelompok penguasa dengan kelompok-kelompok pengusaha yang memiliki kepentingan terbungkus dalam sebuah *klen* tertentu yang menguasai dan mengatur arah kebijakan terkait dengan pengembangan perusahaan di Kabupaten Maros. Eksistensi dan perkembangan perusahaan di Kabupaten Maros di tengah resistensi sosial bisa jadi bukan disebabkan oleh adanya kontribusi yang nyata bagi kesejahteraan masyarakat, melainkan adanya hubungan gelap

antara kekuasaan dan bisnis. Karenanya, pertanyaan penelitian ini bagaimana pola relasi antara kelompok penguasa dengan kelompok pengusaha pada atmosfer politik Maros di Indonesia?

2. TINJAUAN PUSTAKA

a) Formasi Wacana Risiko Perusahaan

Dalam memahami formasi diskursif, Foucault (1972) pendekatan arkeologi yang dimaksudkan untuk mengkaji perbedaan-perbedaan wacana dalam setiap babakan peradaban. Dalam hal ini dikenal, dua macam kontradiksi yakni; (1) kontradiksi yang hanya nampak di permukaan yang akan hilang jika dicermati kesatuan mendalam dari diskursusnya; dan (2) kontradiksi yang menyangkut berbagai fundamen diskursus. Selanjutnya pendekatan arkeologi Foucault (1972), positivitas dimaknai sebagai lingkup komunikasi (kesatuan wacana) dari wacana yang bertebaran dimana-mana. Dimana dengan menggunakan tolok ukur ialah apriori historis yang terdapat dalam setiap pernyataan aktor, sehingga menghasilkan medium yang digunakan adalah arsip. Wacana apriori historis yang terdapat dalam setiap pernyataan aktor yang berujung pada penggunaan arsip ialah adanya wacana pelanggaran- pelanggaran yang disebabkan oleh operasionalisasi perusahaan.

Kerusakan dan pelanggaran yang dimaksud adalah rusaknya kawasan endemik batuan yang mengakibatkan ekologi karst akan terancam kelestariannya. Sementara pelanggaran yang dimaksud adalah seringkali perusahaan didapati tidak sesuai dengan izin operasional mereka untuk melakukan kegiatan

eksplorasi maupun kegiatan eksploitasi disekitaran kawasan ekologi karst di Kabupaten Maros. Sementara itu wacana diskursif yang berseliweran bersumber dari wacana risiko perusahaan yang lahir adalah penguasa hanya berpihak kepada pengusaha. Wacana lain juga adanya konspirasi politik dan konspirasi kepentingan diantara penguasa dan pengusaha dalam membuat sebuah kebijakan yang lebih cenderung menguntungkan pihak perusahaan dibandingkan kesejahteraan warga masyarakat. Kebijakan ini seringkali lahir melalui pemberian izin perusahaan yang tidak memikirkan kepentingan warga masyarakat secara keseluruhan khususnya mereka yang bermukim disekitaran lokasi perusahaan, kemudian izin perusahaan ini terbit lewat kongkalikong diantara penguasa dan pengusaha.

Selaras dengan pandangan yang menarik dalam produksi dan reproduksi wacana Foucault adalah apa yang disebutnya sebagai diskontinuitas, tahan, seri, dan keretakan (*rupture*). Foucault (1972), berpandangan bahwa setiap periode peradaban niscaya memiliki kekhasannya sendiri. Kekhasan masing-masing identitas peradaban sangat ditentukan tiga pilar yang mendominasi, diantaranya; (1) wacana; (2) kekuasaan; dan (3) pengetahuan. Ketiga pilar ini tidak dapat saling dipisahkan hal ini disebabkan ketiga pilar ini saling bersinergi satu sama lainnya dalam peradaban pengetahuan (*episteme*).

Konsep wacana yang seringkali didalilkan oleh aktor penguasa seringkali memproduksi asumsi bahwasanya pengembangan perusahaan adalah sebuah berkah tersendiri dalam peningkatan ekonomi wilayah, namun demikian

juga ada wacana pertentangan dari kalangan pemerhati lingkungan maupun tokoh masyarakat yang memproduksi wacana bahwasanya perusahaan tersebut telah merusak lingkungan. Selanjutnya konsep kekuasaan adalah merupakan hak kodrati yang dimiliki oleh penguasa dalam memproduksi sebuah wacana untuk memengaruhi bahkan menciptakan *statemen* positif yang digunakan untuk memengaruhi pandangan masyarakat, sehingga dengan harapan mudah diterima oleh kalangan masyarakat.

Selanjutnya konsep pengetahuan yang lazim digunakan oleh aktor penguasa adalah dengan membangun model regulasi pengembangan perusahaan dengan melakukan beberapa modifikasi agar terkesan berpihak kepada warga masyarakat dan menghindari unsur-unsur mendiskreditkan warga masyarakat, juga membuat kesan bahwasanya perusahaan tersebut ramah lingkungan. Ketiga konsep inilah yang lazim digunakan oleh penguasa untuk memainkan wacananya sehingga menarik perhatian warga masyarakat dan menganggap sebagai sebuah keberhasilan bagi Kepala Daerah dalam menjalankan tugasnya. Selaras dengan tujuan untuk menginvestigasi retakan-retakan (*ruptures*) peradaban dari setiap seri *episteme*, maka Foucault (1972) melalui konsep pendekatan arkeologi menuntut peneliti untuk mencermati fitur-fitur peradaban, karena *episteme* bukan merupakan apa yang muncul di dalam peradaban, melainkan apa yang tersembunyi di baliknya didominasi pengetahuan pada masa lalu.

Pemahaman wacana tentang ideologi sebagaimana yang disisipkan dalam praktik kewacanaan

bergantung pada pandangan yang menyatakan ideologi sebagai praktik yang beroperasi dalam proses pemroduksian makna dalam kehidupan sehari-hari, sebaliknya makna dimobilisasikan agar bisa mempertahankan hubungan-hubungan kekuasaan (Thompson, 1990). Fokus ini bertentangan dengan konsepsi ideologi pada banyak pendekatan Marxist. Marxist tidak tertarik pada struktur ideologi-ideologi tertentu, atau pada bagaimana ideologi diartikulasikan dalam konteks-konteks sosial khusus. Namun demikian, mereka telah memberikan perlakuan ideologi sebagai sistem nilai abstrak yang memiliki fungsi sebagai daya tarik sosial (*social pull factor*), yakni menarik dan mengikat orang-orang secara bersama-sama dan dengan demikian mengukuhkan keruntutan tatanan sosial.

b) RelasiPengusaha Dan Penguasa

Beranjak dari pendapat teori Fairlough; Chouliaraki, dan Thompson fenomena relasi penguasa dan pengusaha di Kabupaten Maros adalah melalui wacana keluhan yang terjadi dikalangan warga masyarakat khususnya bagi penduduk lokal yang merasakan dampak terjadinya disintegritas melalui kerusakan-kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh kegiatan eksplorasi dan eksploitasi perusahaan. Kegiatan eksplorasi dan eksploitasi inilah yang selanjutnya menjadi momok yang mengkhawatirkan bagi masyarakat dengan ancaman kerusakan bagi tanaman persawahan dan juga terjadi abrasi disekitaran bibir sungai yang berdampak terhadap produktivitas pertanian warga. Respon wacana yang diproduksi oleh penguasa kalangan eksekutif adalah beralih

melalui izin yang telah dikantongi oleh perusahaan pertambangan ini sudah sesuai dengan mekanisme dan aturan yang berlaku—dimulai dari perizinan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Amdal) hingga Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UPL) yang dilakukan oleh Dinas Badan Lingkungan Hidup Daerah (BLHD) sudah sesuai dengan mekanisme yang berlaku. Disamping itu dalih lain yang dikatakan oleh penguasa dari lembaga legislatif adalah sewaktu perusahaan tersebut ingin didirikan warga setuju dengan melakukan penandatanganan perjanjian persetujuan untuk mendirikan perusahaan dengan segala risiko yang akan terjadi dikemudian hari.

Beranjak dari teori Hegemoni Gramsci yang dikembangkan oleh Fairlough dan Laclau, maka realitas relasisosial yang terjadi adalah penguasa memproduksi wacana peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan memberikan argumentasi pendapat bahwasanya pengembangan perusahaan merupakan berkah bagi daerah terlebih bagi warga masyarakat lokal. Dengan dalih tersedianya kesempatan kerja dan berdampak kepada *peningkatan ekonomi* warga masyarakat. Kelompok penguasa ini lalu mengkalim bahwa kelompoknya telah berhasil dalam mengantarkan wilayahnya untuk terlepas dari jeratan kemiskinan melalui peningkatan PAD-nya bersumber dari pengembangan perusahaan yang selanjutnya disebut sebagai model penciptaan fenomena sosial pencitraan diri bagi penguasa dalam melanggengkan kekuasaannya yang seringkali juga meninggalkan warna kepartaiannya dalam membuat keputusan politik dan

mengesampingkan dirinya sebagai politisi, demi untuk melanggengkan kekuasaannya.

Hal ini selaras dengan pemikiran Laclau dan Mouffe dalam reproduksi dan perubahan makna, dalam istilah umumnya, merupakan tindakan politik. *Politik* dalam teori wacana tidak harus dipahami sebagai misalnya, politik ke-partai-an yang sebagian besar hanya membicarakan representasi politik dan kekuasaan. Akan tetapi, politik dilihat sebagai konsep yang luas dan mengacu pada bagaimana cara kita menyusun fenomena sosial dengan cara-cara yang meniadakan cara-cara yang lain. Laclau dan Mouffe memahami politik sebagai organisasi masyarakat dari satu sisi tertentu dengan cara tertentu yang meniadakan semua kemungkinan adanya cara yang lain.

Konsep relasi kekuasaan dalam pendekatan Laclau dan Mouffe erat kaitannya dengan konsep politik dan objektivitas (Laclau, 1990). Kekuasaan tidak dipahami sebagai sesuatu yang dimiliki orang-orang dan dilaksanakan terhadap orang lain, melainkan sesuatu yang dapat menghasilkan dunia sosial. Kelihatan aneh jika menggunakan kata “kekuasaan” untuk menggambarkan kekuatan dan proses yang dapat menciptakan dunia sosial kita dan membuat dunia sosial tersebut bermakna bagi kita. Namun demikian, hal yang utama bahwa pemahaman tentang relasi kekuasaan ini menekankan adanya ketergantungan dunia sosial. Kekuasaanlah yang menciptakan pengetahuan kita, identitas kita dan bagaimana kita berhubungan satu sama lain sebagai kelompok atau individu. Pengetahuan, identitas, dan hubungan sosial tergantung pada waktu tertentu, ketiganya melahirkan

suatu bentuk tertentu, namun bisa saja dan bisa menjadi berbeda.

3. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian adalah kualitatif dengan menggunakan pendekatan konstruktivisme. Dalam pengumpulan datanya, peneliti mengumpulkan data wacana melalui media cetak dan elektronik, serta peneliti bertindak selaku instrumen penelitian. Data dikumpulkan ialah relasi antara penguasa dan pengusaha pada atmosfer politik di Kabupaten Maros Sulawesi Selatan Indonesia. Data tersebut diperoleh melalui dua sumber data, yakni; dokumentasi dan informan. Teknik pengumpulan datanya dilakukan melalui metode wawancara mendalam. Data tersebut selanjutnya dianalisis dengan menggunakan teknik analisis interaktif dimaksudkan untuk melihat proses, makna, dan efek dari produksi dan reproduksi wacana.

Lokasi penelitian terletak di Kabupaten Maros Sulawesi Selatan Indonesia. Adapun informan dalam penelitian ini sebanyak 16 Orang yang dipilih dengan cara *purposive random sampling*. Jenis data penelitian yang diperlukan adalah data primer berupa praktik diskursif (produksi dan reproduksi wacana) dan data sekunder berupa praktik non-diskursif (peristiwa sosial, ekonomi, dan peristiwa alam) yang menyertai fenomena relasi kelompok kekuasaan dan kelompok pengusaha juga sebagai akibat dari pertumbuhan perusahaan di Kabupaten Maros. Tahapan pengumpulan dan analisis data mengikuti alur siklus, interaktif, dan berlangsung secara terus-menerus sampai tuntas, sehingga data menjadi jenuh. Konsep tersebut meliputi *data reduction*, *data*

display, dan *conclusion: drawing/verifying*.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

Temuan yang menarik dari hasil eksplorasi dan eksperimen dalam penelitian ini juga datang dari wacana pengembangan perusahaan dan industri yang sama sekali tidak pernah diketemukan penguasa lembaga legislatif yang memproduksi wacana kesejahteraan yang bersumber dari perusahaan. Umumnya wacana kesejahteraan ini diproduksi oleh penguasa lembaga eksekutif. Arti dan makna subjektif dari wacana tersebut kemudian ditafsirkan kedalam pola relasi kuasa yang domain dimiliki dan diproduksi oleh penguasa lembaga eksekutif. Penguasa dari lembaga legislatif nanti kemudian mengetahui bahwasanya penguasa dari kalangan eksekutif dalam tahap pelaksanaannya sering menutup diri dalam pola relasinya dengan kelompok pengusaha. Hal ini akan diketahui manakala program pengembangan industri tersebut akan diresmikan oleh kalangan penguasa lembaga eksekutif.

Hal yang menarik dalam temuan penelitian ini adalah umumnya perusahaan yang diduga merusak ekologi karst adalah perusahaan yang melalui penciptaan iklim usaha. Perusahaan-perusahaan yang diciptakan lewat iklim usaha inilah yang seringkali diduga telah melakukan tindakan pengrusakan lingkungan. Dugaan ini memiliki motif yang berbeda-beda, dimulai dari kegiatan eksplorasi dan eksploitasi, pengerukan tanah, pengrusakan jalan, pencemaran udara dikarenakan debu, pencemaran lingkungan lewat limbah operasional

perusahaan, kerusakan keanekaragaman hayati, dan retakan-retakan yang terjadi didinding batuan gunung yang memiliki ukiran dan gambar yang asli peninggalan nenek moyang. Sementara itu perusahaan yang model usahanya lewat program maupun proyek yang digalakkan oleh pemerintah jarang diketemukan melanggar dan merusak lingkungan oleh karena konsentrasi usaha mereka disektor proyek pengadaan barang dan jasa. Beranjak dari temuan tersebut bahwasanya wacana kesejahteraan yang seringkali didalilkan oleh lembaga eksekutif masih sejalan dengan pandangan Foucault (1972), wacana dicirikan oleh batasan bidang dari objek, definisi dan perspektif yang paling dipercaya dan dianggap benar. Produksi dan reproduksi wacana dalam arena pertarungan multi-kepentingan akan menghasilkan pola wacana yang dominan dan wacana yang terpinggirkan sebagai efek dari kontestasi wacana.

Lembaga eksekutif memproduksi wacana melalui keberadaan pengembangan perusahaan untuk kesejahteraan sedangkan disisi lain penguada dari kalangan lembaga legislatif seringkali tidak mengetahui program pengembangan perusahaan tersebut. Sehingga dikemudian hari baru diketahui bahwasanya lembaga eksekutif telah menjalin kerjasama dengan pengusaha maupun investor untuk melakukan pengembangan perusahaan maupun untuk membenamkan sahamnya. Pandangan wacana lain yang diproduksi oleh penguasa dari lembaga eksekutif adalah dengan adanya *Corporate Social Responsibility* (CSR) yang selama masa pengembangan perusahaan-perusahaan besar juga membantu

warga masyarakat dalam hal pembangunan masyarakat, selain itu juga membantu peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten Maros.

Dampak seperti inilah yang menjadi daya dorong bagi penguasa lembaga eksekutif untuk melakukan kerjasama, namun tidak dapat dipungkiri juga bahwasanya sumber dari peningkatan PAD hanya sebagian besar saja dari perusahaan-perusahaan yang beroperasi di Kabupaten Maros, oleh karena sumber lain dari peningkatan PAD juga bersumber dari sektor pariwisata, sektor pertanian, dan sektor-sektor yang menjadi unggulan di Kabupaten Maros. Struktur sosial yang bermain adalah faktor kedekatan diantara penguasa dengan pengusaha. Pengusaha seringkali memanfaatkan faktor kedekatan untuk selanjutnya melakukan lobb- lobb politik dalam hal anggaran maupun meloloskan kegiatan rencana proyek yang akan dilakukan di daerah. Sementara struktur materialnya meliputi ruang lingkup proyek yang akan dikerjakan. Seberapa besar keuntungan dari pengerjaan proyek tersebut umumnya juga berasal dari masukan multiaktor yang memiliki peran dalam meloloskan proyek utnuk selanjutnya dikerjakan. Alhasil, ketika dilakukan evaluasi maka hasil yang diharapkan jauh dari kenyataan. Dimensi ini, yang seringkali membuat warga masyarakat menjadi gamang, disatu sisi proyek itu adalah sebagai fasilitas dan sarana utama dalam mendukung segala kegiatan, namun disisi lain proyek tersebut tidak sesuai dengan harapan yang diharapkan oleh warga masyarakat.

B. PEMBAHASAN

1. Formasi Wacana Kesejahteraan Perusahaan

Pengelompokan formasi wacana kesejahteraan perusahaan, merupakan realitas sosial yang dibangun oleh dua konsep fundamental kuasa dan pengetahuan. Kuasa lahir atas dasar kesadaran sebagai kelompok penguasa yang memegang kekuasaan yang membuka ruang dalam menjalin pola relasi dengan pengusaha untuk mengembangkan usaha maupun membenamkan investasinya, sementara itu praktik pengetahuan dengan memanfaatkan kondisi geografis wilayah misalnya ketersediaan lahan dan Sumber Daya Alam (SDA) untuk dijadikan sebagai daerah pengembangan perusahaan. Pengembangan-pengembangan perusahaan dalam berbagai bentuk dan manifestasinya, telah membentuk pengetahuan bagi golongan awam tentang keberadaan perusahaan secara *ekonomi dan sosial* lewat penciptaan iklim usaha. Warga masyarakat yang termasuk golongan awam menganggap dengan status pengembangan perusahaan sebagai berkah dan keberuntungan yang dapat meningkatkan ekonomi sosial mereka. Kemudian anggapan ini bertransformasi menjadi energi utama penggerak inisiatif untuk membentuk wadah dukungan, agar segala bentuk wacana yang digelontorkan oleh kelompok penguasa yang sedang dihadapi dapat dengan mudahnya diterima.

Formasi wacana kesejahteraan perusahaan menurut logika di atas merupakan sebuah realitas yang dikonstruksi oleh sikap dan perlakuan kelompok penguasa dan kelompok pengusaha dalam kehidupan sosial ekonomi warga

masyarakat dengan jalan membuat wacana. Sebagaimana yang dikemukakan oleh Foucault (1980), kekuasaan menyebar dimana-mana (*power is omnipresent*). Kekuasaan beroperasi secara terus-menerus dalam menciptakan pengetahuan.

Sehubungan dengan itu, kekuasaan selalu beroperasi melalui nalar konstruksi pengetahuan, dimana keduanya bersinergi satu sama lain. Kekuasaan-kekuasaan tidak dimiliki (*power is not possessed*) dengan maksud lain tidak semata-mata terkonsentrasi di tangan individu atau struktur yang dominan, baik oleh negara, perusahaan, ataupun organisasi, melainkan kekuasaan meresap dalam seluruh jalinan-jalinan relasi sosial (Foucault, 1977).

Pandangan Foucault di atas seakan masih terasa terjadi dalam dunia kesejahteraan yang diakibatkan oleh perusahaan. Jika pandangan teoritik Foucault mengakui bahwasanya kekuasaan tidak dimiliki (*power is not possessed*) untuk menghadapi kekuasaan eksternalitas, lain halnya dengan wacana kesejahteraan perusahaan yang memiliki kesadaran filosofis terhadap warga masyarakat. Wacana kesejahteraan perusahaan ini diproduksi dan didalilkan oleh kelompok penguasa melalui konsep optimisme yang berseliweran luar biasanya untuk memberikan ruang dukungan dari warga masyarakat dalam meminimalisir pengaruh dari aksi penolakan dan aksi protes yang begitu kompleksnya seringkali dikumandangkan oleh pemerhati lingkungan dan tokoh masyarakat yang fokusnya pemerhati lingkungan.

Sejumlah kelompok penguasa yang sudah menciptakan wacananya, mulai membangun kekuatan dengan memanfaatkan pengetahuan yang

dimilikinya. Penguasa secara sadar mengetahui betul, kekuatan kekuasaan yang dimilikinya dapat mendatangkan relasi dengan investor untuk membenamkan saham maupun mengembangkan perusahaannya. Skema konstruktivis yang diperankan oleh penguasa lembaga eksekutif merupakan hasil olahan dari kerjasama kognitif dalam menafsirkan relasi dengan pengusaha yang telah ada maupun yang akan baru menjalin kerjasama diantara multiaktor. Sebagaimana yang diketahui dalam penelitian ini yang dimaksud dengan penguasa dari lembaga eksekutif adalah pemerintah. Pemerintah yang selanjutnya menguasai sistem pemerintahan, birokrasi, hingga partai politik di daerah sangatlah berperan terhadap pertanggung jawaban amanah yang dititipkan kepada Kepala Daerahnya.

Kesadaran untuk bekerjasama ini kemudian menggunakan kekuasaan yang ada, dan kuasa dipraktikkan dalam setiap wacana yang didalilkan. Hal ini nampak ketika penguasa memproduksi wacana kesejahteraan melalui pengembangan perusahaan maupun industri di Kabupaten Maros. Sebagaimana yang ditegaskan Foucault (1972), mengenai pembentukan regulasi-regulasi diskursus (*the discursive regularities*) meliputi beberapa aspek, yakni produksi objek, produksi modalitas penyampaian, produksi konsep-konsep, dan produksi berbagai strategi. Berbagai regulasi diskursif ini menentukan seseorang dalam memilah, mengelasifikasikan, dan menggolongkan wacana yang benar dan yang salah, mana yang sah dan mana yang tidak. Dengan demikian, formasi wacana menentukan pola

struktur sosial dan pola struktur material. Oleh karenanya, tidak hanya sekedar menangkap realitas kekuasaan yang nampak dipermukaan, melainkan menemukan dan memaknai regularitas formasi diskursifnya sebagaimana tradisi *post-struktural*. Formasi diskursif dalam relasi sosial manusia tidaklah berdiri secara otonom dalam kerangka kebenaran objektif, melainkan wacana menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari proses dan mekanisme kekuasaan.

Mengenai pembentukan diskursus sebagaimana yang ditegaskan Foucault dengan fakta dan data hasil eksplorasi penelitian di Kabupaten Maros umumnya struktur wacana disistematiskan oleh kelompok penguasa yang memiliki kepentingan untuk membangun daerah. Kelompok kepentingan yang dimaksud adalah penguasa dari lembaga eksekutif. Kelompok penguasa inilah yang memiliki kepentingan dengan mengatasnamakan pembangunan daerah perihal keberhasilannya dalam model pembangunan wilayah berbasis pengembangan industri dengan memproduksi dalil wacana yang berkembang dikalangan warga masyarakat khususnya mereka yang memiliki taraf pengetahuan Sumber Daya Manusia (SDM) yang terbatas (awam). Sehingga dengan sendirinya wacana inipun berhasil merasuki alam bawah sadar warga masyarakat menganggapnya sebagai sebuah bentuk keberhasilan yang dilakukan oleh penguasa lembaga eksekutif. Sehingga penguasa lembaga eksekutif dianggap berhasil dalam pemerintahannya. Dari wacana inilah maka dengan sendirinya kerjasama kognitif diantara kelompok penguasa dari kalangan eksekutif dengan kelompok pengusaha menjalin

kerjasamanya dengan mengatasnamakan kepentingan pengembangan wilayah untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

2. Atmosfer Politik Dalam Relasi Kuasa dan Bisnis di Kabupaten Maros

Eksplorasi data motif atmosfer politik dalam pola relasi kuasa dan bisnis Maros sangatlah “seksi” untuk dijadikan sebagai bahan eksperimen dalam penulisan ini. Hal ini disebabkan bahwasanya motif atmosfer politik di Kabupaten Maros, semarak dengan berbagai macam dan ragam kepentingan. Macam dan ragam bentuk kepentingan ini tertuang dalam wadah Tim Sukses dimasa pemilihan Calon Kepala Daerah, maupun mereka-mereka yang memiliki hubungan atau kedekatan secara biologis dengan Kepala Daerah. Mereka yang tergabung dalam Tim Sukses Pemilihan Calon Kepala Daerah adalah mereka yang berlatar belakang sebagai pengusaha, politisi, birokrat, tokoh masyarakat, hingga akademisi. Tujuannya adalah ikut bergabung dan menjadi bagian dalam lingkaran kekuasaan politik. Beragam macam latar belakang inilah kemudian membuka ruang untuk membentuk sebuah pola relasi diantara penguasa dan mereka yang memiliki andil dan dukungan semasa pemilihan Kepala Daerah.

Modal, kuasa, dan dukungan sangatlah penting dalam sebuah kondisi atmosfer politik. Khususnya bagi pendukung yang berlatar belakang sebagai pengusaha yang berduit maka konsekuensi dalam deal-deal politik yang terjadi adalah dengan jalan transaksi kebijakan. Transaksi kebijakan ini seringkali nampak dalam proses maupun

rencana kerja pemerintahan yang mengarahkan kepada proyek pengadaan maupun proyek jasa, hingga membuka iklim usaha. Bagi politisi yang memiliki kepandaian dan kepiawaian dalam menyusun strategi pemenangan kelak dikemudian hari akan menjadi salah satu penentu kebijakan khususnya dalam penanganan masalah pembangunan maupun tender proyek yang dinilai memiliki simbol “lahan basah”. Sementara bagi tokoh masyarakat hingga bagi akademisi umumnya mereka akan ditempatkan sebagai bagian dari penyusun maupun tim dalam pelaksanaan roda pemerintahan, diantaranya sebagai staf ahli. Fokus kajian disini adalah mereka yang berlatar belakang sebagai pengusaha yang juga sudah sukses menjadikan salah satu kandidat Pemilihan Kepala untuk duduk dikursi kekuasaannya. Sehingga tidak jarang pengusaha yang sudah rela untuk mengorbankan segala sumber daya yang dimilikinya secara tidak langsung sudah mengantongi “tiket nota kesepakatan politik” diantara penguasa yang telah berhasil terpilih dalam pemilihan Kepala Daerah.

Kesepakatan politik inilah yang selanjutnya akan dijadikan rujukan untuk membuat program-program yang mengarah kepada pembangunan namun tidak sedikit juga untuk menciprati dari kesepakatan diantara pengusaha dengan penguasa yang telah lebih dahulu memiliki janji politik semasa kampanye dahulu. Hal ini dapat dicermati ketika pada masa awal setelah pengumuman penetapan Kepala Daerah kita dapat mengeceknya melalui pola relasi kerja yang telah terbangun namun tiba-tiba munculnya pemodal asing—membenamkan sahamnya

hingga dapat mengembangkan perusahaannya dimasa awal-awal Kepala Daerah tersebut menjabat. Transaksi kebijakan diantara pola relasi penguasa dan pengusaha adalah umumnya dalam bentuk pembangunan gedung baru, renovasi gedung, perbaikan sarana dan parasarana jalan, program betonisasi, program penerangan lampu jalan dan lampu hias, hingga perbaikan median tanaman disepanjang jalan ibukota. Dari transaksi inilah seringkali ditemukan beberapa ketimpangan dan kegagalan diantaranya misalnya program tersebut yang tidak sesuai dengan aspirasi warga masyarakat, kemudian program tersebut tidak tepat sasaran oleh karena berbanding terbalik dengan apa yang diharapkan oleh warga masyarakat.

Ketidaksesuaian program tersebut disebabkan karena Kepala Daerah membangun sesuai dengan visi-misi mereka semasa kampanye yang tidak sesuai dengan kenyataan yang terjadi dilapangan. Didalam visi-misi ini seringkali disisipkan kepentingan-kepentingan kelompok politik diantara multiaktor yang bermain dibelakang panggung kekuasaan. Hal ini selaras dengan pemikiran Hay, 1997 (Keith Faulks, 2012), dengan berpijak pada pendirian Hay, dimana mengusulkan agar setiap analisis tentang kekuasaan mempertimbangkan faktor-faktor, diantaranya:(1) jenis kekuasaan; (2) sumber daya kekuasaan; (3) metode kekuasaan; (4) struktur kekuasaan, (5) situs kekuasaan; dan (6) akibat kekuasaan. Adapun temuan dalam eksplorasi penelitian ini dari aspek relasi kuasa dan bisnis terdapat tiga dimensi penting yang terjadi dalam fenomena atmosfer politik Maros di Indonesia yakni; *pertama*, dimensi kekuasaan

dapatlah dipengaruhi melalui relasi politik dan bisnis yang telah dibangun pada saat mencalonkan diri sebagai Calon Kepala Daerah, *kedua*, dimensi kekuasaan memiliki pola yang dinamis sesuai dengan kebutuhan diantara multiaktor yang didalamnya terdapat beberapa kepentingan-kepentingan politik dan bisnis untuk mengubah arah kebijakan pembangunan, *ketiga*, dimensi kekuasaan lebih cenderung mengarah kepada aspirasi dari relasi yang dibangun melalui konspirasi politik dan bisnis. Ketiga dimensi ini yang seringkali berkutut dan berseliweran dalam tatanan atmosfer politik Maros di Indonesia.

5. PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Simpulan yang dirumuskan pada studi ini adalah relasi kelompok penguasa dengan kelompok pengusaha pada atmosfer politik Maros tumbuh dan berkembang dalam dua dimensi, yakni; dimensi subjektif dan dimensi objektif. Kedua dimensi ini berpengaruh secara resiprokal dalam memproduksi hingga mereproduksi wacana kekuasaan yang menghasilkan dukungan terhadap kelompok penguasa level atas, level menengah, hingga menurun ke level penguasa terendah di daerah. Dukungan kekuasaan ini juga diharapkan mengalir kepada warga masyarakat dengan harapan bahwasanya program kerjasama yang diciptakan oleh penguasa dan pengusaha ini berhasil dan mendapat respon positif. Pada mulanya penemuan relasi kelompok pengusaha secara subjektif dipahami sebagai hubungan untuk mengembangkan potensi-potensi wilayah melalui investasi saham, pengembangan sektor usaha, hingga

pembangunan proyek dan program dari penguasa serta penciptaan iklim usaha. Sedangkan secara objektif, pada praktiknya dimana aktor pengusaha yang bergerak dalam pengerjaan proyek maupun program pemerintah umumnya mereka memiliki kedekatan dengan penguasa. Pola kedekatan ini nampak dalam hubungan kekeluargaan maupun sebagai anggota pengurus partai politik yang berkuasa. Sehingga dengan mudahnya untuk memperoleh informasi bagi pengusaha untuk mengerjakan kegiatan proyek maupun program-program yang telah direncanakan sebelumnya oleh penguasa.

5.2 Saran

Pertama, Hendaknya hindarilah kegiatan pengerjaan proyek maupun program-program dari pemerintah ini didapati seringnya melakukan pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan bersama dengan oknum penguasa yang memiliki kekuasaan untuk menggunakan anggaran daerah/negara. Pelanggaran tersebut diantaranya menggelembungkan harga (*mark-up*) yang tidak sesuai dengan fakta yang sebenarnya, penyelewengan anggaran (korupsi), hingga sampai pada taraf kegiatan kortapokrasi (korporasi perusahaan dan birokrasi) bersama dengan penguasa yang dengan sengajanya melakukan kerjasama illegal diantara penguasa dan pengusaha. *Kedua*, Sementara untuk kelompok pengusaha yang tercipta lewat iklim usaha ini adalah juga tidak terlepas dari relasi politik yang sudah tercipta sebelumnya. Relasi politik yang dimiliki oleh pengusaha besar yang umumnya bergerak disektor pertambangan ini berada pada pucuk penguasa pada level nasional. Sehingga dengan kekuatan dan

kekuasaan politik (*bargaining politic*), maka dengan mudahnya untuk memperoleh akses dan mendapatkan Izin Usaha Pertambangan (IUP). Kelompok pengusaha yang bergerak pada sektor pertambangan ini, disatu sisi mendatangkan dampak positif kepada pertumbuhan ekonomi warga masyarakat dan juga sebagian sumbangannya terhadap Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD), Namun sebagai pengusaha janganlah mencari keutungan semata namun tidak memperhatikan keselamatan sekitar, yakni; pencemaran lingkungan, kerusakan keanekaragaman hayati, pencemaran udara, tanah, dan air, hingga kerusakan ekologi karst pada wilayah eksplorasi dan eksploitasi pertambangan. Alhasil, lewat wacana, kuasa, dan pengetahuan yang memproduksi sebuah logika yang dibangun oleh penguasa dan pengusaha melalui realitas warga masyarakat awam yang minim dengan pengetahuan untuk menciptakan kondisi atmosfer politik di Kabupaten Maros Sulawesi Selatan Indonesia.

Daftar Pustaka

- Achwan, R. 2011. *Hidup Bersama Oligarki (Bisnis Pakaian Jadi di Daerah)*. Dalam Majalah Prisma *Perselingkuhan Bisnis & Politik; Kapitalisme Indonesia Pasca-Otoritarianisme*. Vol. 32, No. 1, 2013. Jakarta; LP3ES.
- Amri, U. 2010. *Power Contestation and Environmental Degradation: Evidence From Bombana's Gold Mining Site, Southeast Sulawesi Province, Indonesia*. Di muat pada jurnal POLITIKA Vol 1, No. 2,

- Oktober 2010.
(Online), (<http://ejournal.undip.ac.id/index.php/politika/article/download/2849/2533>),
(diakses, 13 Juni 2015).
- Brown, A. B. 2006. *Indonesian Corporations, Cronyism, and Corruption*. *Journal Modern Asian Studies* 40, 4 (2006) pp. 953–992, 2006 Cambridge University Press
doi:10.1017/S0026749X06002216 Printed in the United Kingdom. (Online), (<http://search.proquest.com/>),
(diakses 12 Juni 2015).
- Bulkhin, F. 1983. *Negara dan Masyarakat: Politik Indonesia dibawah Orde Baru, 1966-1978*. Disertasi Ph.D. University of Washington, 1983. Disertasi tidak dipublikasikan.
- Djani, L dan Saputro, P A. 2011. *Membaca Relasi Negara dan Kapital di Tingkat Lokal; Sebuah Tawaran Kerangka Analisis*. Dalam Majalah Prisma *Perselingkuhan Bisnis & Politik; Kapitalisme Indonesia Pasca-Otoritarianisme*. Vol. 32, No. 1, 2013. Jakarta; LP3ES.
- Faulks, K. 2012. *Sosiologi Politik (Pengantar Kritis)*. Terjemahan dari *Political Sociology: A Critical Introduction*. 1999. Edinburgh: Edinburgh University Press. Bandung: Nusa Media.
- Foucault, M. 1972. *The Archeology of Knowledge*. London: Tarvistock.
_____ 1977. *Discipline and Punish, The Birth of the Prison*. New York: Random House.
_____ 1980. *Power/Knowledge: Selected Interviews and Other Writing 1972-1977*. New York: Pantheon Books.
- Innah, H. S, Hadi D. A, Suharjito, D, dan Darussalam, D. 2012. *Peran Dinamika Jejaring-Aktor Dalam Reforestasi di Papua (The Role of Actor-Network Dynamics on Reforestation in Papua)*. Di muat pada Jurnal Penelitian Sosial dan Ekonomi Kehutanan Vol. 9, No. 2 Juni 2012, Hal 96-112. (Online), (http://fordamof.org/files/Jurnal_Sosek_9-2-2012-5.Henry_Silka_dkk.pdf),
(diakses 13 Desember 2014).
- Laclau and Mouffe. 1985. *Hegemony and Socialist Strategy: Towards a Radical Democratic Politics*. Verso.
- Laclau. 1990. *Kapitalist Devlet Sorunu*. Iletisim.
- Mas'oeed, M. 1989. *Ekonomi dan Struktur Orde Baru 1966-1971 (Orde Ekonomi Baru dan Struktur Politik 1966-1971)*. Disertasi Ph.D. Ohio State University, 1989. Disertasi tidak dipublikasikan.
- Suyatna, H. 2012. *Dominasi Elite Lokal Dalam Arena Pengembangan Industri Kecil di Era Desentralisasi*. Dalam Majalah Prisma *Perselingkuhan Bisnis & Politik; Kapitalisme Indonesia Pasca-Otoritarianisme*. Vol. 32, No. 1, 2013. Jakarta; LP3ES.
- Thompson, 1990. *Ethics and Politics: cases and comments*. Nelson-Hall.